

NAMA : NOIVA CORINA ADISA

KELAS : 2/F

NPM : 2413053202

PRODI : PGSD

ANALISIS JURNAL

DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Jurnal ini membahas keterkaitan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Dalam tulisan ini, penulis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara demokrasi dan hukum, pelaksanaan pemilihan umum daerah (Pilkada) belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut. Ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip Pancasila dan realitas politik yang ada di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila diterapkan dalam Pilkada. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penulis menganalisis berbagai aturan dan regulasi hukum yang terkait dengan pemilu dan demokrasi. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menilai sejauh mana hukum dan regulasi mendukung atau menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah. Misalnya, terdapat konflik internal dalam partai politik, kecurangan dalam proses pemilu, dan dominasi elit partai dalam pencalonan kepala daerah. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada juga menjadi isu yang signifikan. Calon independen yang ingin maju dalam Pilkada harus menghadapi persyaratan yang sangat berat, sehingga mengurangi kesempatan rakyat biasa untuk terlibat dalam pemerintahan. Ini menciptakan kesan bahwa sistem demokrasi lebih menguntungkan mereka yang memiliki akses ke kekuasaan dan sumber daya daripada masyarakat umum.

Jurnal ini juga menyoroti bahwa partai politik, yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi, sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Proses pencalonan kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh elit partai, bukan melalui

musyawarah yang melibatkan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan semangat permusyawaratan dalam sila keempat Pancasila. Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses ini dapat menyebabkan apatisme politik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Sebagai kesimpulan, jurnal ini menyatakan bahwa Pilkada langsung yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya reformasi dalam sistem pemilihan umum dan peran partai politik agar demokrasi di Indonesia tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substansial, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Reformasi ini diperlukan agar nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dalam praktik demokrasi.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Dengan analisis yang komprehensif, penulis berhasil menunjukkan pentingnya perbaikan dalam sistem politik dan pemilihan umum agar tercipta pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif.